

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Evaluasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas (GCG) dalam Mitigasi Risiko Operasional TI: Studi Kasus Gangguan Layanan Bank Syariah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip transparansi pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tergolong cukup sesuai. BSI telah melakukan komunikasi kepada publik melalui permohonan maaf, siaran pers, dan penyampaian perkembangan pemulihan layanan. Namun, keterbukaan informasi mengenai penyebab gangguan dan indikasi serangan siber belum disampaikan secara jelas pada tahap awal kejadian sehingga menimbulkan ketidakpastian dan memengaruhi kepercayaan sebagian nasabah.
2. Penerapan prinsip akuntabilitas pada BSI tergolong cukup sesuai. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan investigasi insiden, pemulihan layanan secara bertahap, koordinasi dengan regulator dan lembaga terkait, serta penyampaian pertanggungjawaban kepada nasabah. Meskipun demikian, adanya gangguan layanan dan indikasi kebocoran data menunjukkan bahwa pengendalian risiko teknologi informasi dan perlindungan data nasabah masih perlu diperkuat.
3. Tingkat kesesuaian tindakan manajemen krisis BSI terhadap ketentuan POJK tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Tata Kelola berada pada kategori cukup sesuai. Aspek tata kelola TI, respons insiden, dan pemulihan layanan telah sesuai dengan ketentuan regulator. Namun, masih terdapat kesenjangan pada aspek manajemen risiko TI, keamanan informasi, dan perlindungan data nasabah yang menunjukkan perlunya peningkatan mekanisme pencegahan dan deteksi dini terhadap ancaman siber.

4. Berdasarkan temuan analisis kesenjangan, diperlukan penyempurnaan SOP komunikasi krisis dan mitigasi risiko operasional TI. Perbaikan tersebut meliputi peningkatan transparansi komunikasi kepada publik, penguatan sistem deteksi dini ancaman siber, peningkatan keamanan data, pengujian keamanan sistem secara berkala, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi insiden keamanan siber.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mitigasi risiko operasional teknologi informasi dengan menambahkan prinsip GCG lainnya, seperti responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda, seperti wawancara atau studi komparatif pada beberapa bank, sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai penerapan tata kelola perusahaan dalam menghadapi risiko siber.

2. Bagi Pemerintah dan Regulator

Pemerintah dan regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan dapat terus memperkuat pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan tata kelola teknologi informasi dan manajemen risiko siber pada industri perbankan. Selain itu, diperlukan pengembangan kebijakan dan pedoman yang lebih rinci terkait komunikasi krisis, keamanan informasi, serta perlindungan data nasabah guna meningkatkan ketahanan sektor perbankan terhadap ancaman siber yang semakin kompleks.

3. Bagi Perbankan

Industri perbankan, khususnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk, diharapkan dapat meningkatkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan insiden teknologi informasi melalui penyampaian informasi yang lebih cepat, jelas, dan terstruktur kepada nasabah serta pemangku

kepentingan. Selain itu, perbankan perlu memperkuat manajemen risiko teknologi informasi melalui peningkatan sistem deteksi dini ancaman siber, penguatan keamanan data, pelaksanaan audit keamanan secara berkala, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar mampu merespons dan memitigasi risiko operasional teknologi informasi secara lebih efektif.